

LAPORAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

BULAN OKTOBER 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDEARA BITUNG
2023

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi. Yang paling utama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur tuntutan aspirasi reformasi, agar aparaturnya Negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan kewenangan kepada rakyat Indonesia sebagai pemenang kekuasaan tertinggi Negara.

Sebagai penjabaran lebih lanjut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, yang antara lain menjelaskan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan pelaporan masyarakat adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Keputusan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor KEP1/18/M/PAN/8/2004, tanggal 31 Agustus 2004, tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

II. PERSONIL TIM TINDAK LANJUT DAN PENANGANAN PENGADUAN

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Christian Evendy Yani Muaja, S.IK Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Ketua
2	Dola Mirantika Petma, A.Md Pranata Humas Pelaksana	Sekretaris
3	Marzel Hence Fityly Tumundo, A.Md AP3T Terampil	Anggota
4	Resti Priscilia Okem AP3T Pemula	Anggota
5	Ericer S. Titiheru, S.E Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan UPT

III. JUMLAH PENGADUAN DAN DOKUMEN PENGADUAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Dari hasil penanganan kegiatan pengaduan masyarakat selama bulan Oktober 2023 NIHIL dan tidak adanya pengaduan dalam bidang pelayanan masyarakat, sehingga pelayanan dikategorikan "BAIK" dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengaduan Masyarakat disampaikan dengan cara Kotak Pengaduan, Pengaduan Langsung, langsung pada personil penerima pengaduan, Ruang Pengaduan Publik, Pengaduan Melalui Media Elektronik (Email : ppsppsbitung@yahoo, Facebook : @Humas_PPS Bitung, Twitter : @Humas_PPS Bitung, Instagram : @Humas_PPS Bitung,), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) terlampir. Berikut table pengaduan dan dokumen pengaduan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Bulan Oktober 2023.

No	Bulan	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Keterangan
1	Oktober	-	-	-

IV. PENUTUP DAN SARAN

Jumlah pengaduan (Pengaduan terkait administrasi pelayanan public dan pelayanan jasa kepelabuhanan) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Bulan Oktober 2023 adalah Nihil dan tidak terdapat Pengaduan Baik berupa pengaduan dalam bentuk tulisan /saran yang disampaikan pada kotak pengaduan, langsung pada personil penerima pengaduan, Ruang Pengaduan Publik, Pengaduan Melalui Media Elektronik (Email : ppsppsbitung@yahoo, Facebook : @Humas_PPS Bitung, Twitter :@Humas_PPS Bitung,), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

Bitung, 31 Oktober 2023

Sub Pokja
Pelayanan Usaha

Kodrat Twin Riskiyanti, SH., MH

Lampiran:



Lokasi Kotak Pengaduan : Kantor Utama PPS Bitung



Pengaduan Melalui Media Elektronik: Facebook Humas_PPS Bitung

 **Humas PPS Bitung**
@Humas_PpsBitung

Komik "siBitung" Edisi ke XV Terbit lagi nih #SahabatBahari Tentang Penanganan Pengaduan lingkup Unit Pelaksana Teknis PPS Bitung dan data penanganan pengaduan.
#DJPTBersinergi #PPSBitungTerbaik



Pengaduan Melalui Media Elektronik : Twitter Humas_PPS Bitung



Pengaduan Melalui Informasi Banner Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

LAPORAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

BULAN NOVEMBER 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDEARA BITUNG
2023

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi. Yang paling utama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur tuntutan aspirasi reformasi, agar aparaturnya Negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan kewenangan kepada rakyat Indonesia sebagai pemenang kekuasaan tertinggi Negara.

Sebagai penjabaran lebih lanjut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, yang antara lain menjelaskan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan pelaporan masyarakat adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Keputusan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor KEP1/18/M/PAN/8/2004, tanggal 31 Agustus 2004, tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

II. PERSONIL TIM TINDAK LANJUT DAN PENANGANAN PENGADUAN

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Christian Evendy Yani Muaja, S.IK Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Ketua
2	Dola Mirantika Petma, A.Md Pranata Humas Pelaksana	Sekretaris
3	Marzel Hence Fityly Tumundo, A.Md AP3T Terampil	Anggota
4	Resti Priscilia Okem AP3T Pemula	Anggota
5	Ericer S. Titiheru, S.E Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan UPT

III. JUMLAH PENGADUAN DAN DOKUMEN PENGADUAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Dari hasil penanganan kegiatan pengaduan masyarakat selama bulan FEBUARI 2023 NIHIL dan tidak adanya pengaduan dalam bidang pelayanan masyarakat, sehingga pelayanan dikategorikan "BAIK" dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengaduan Masyarakat disampaikan dengan cara Kotak Pengaduan, Pengaduan Langsung, langsung pada personil penerima pengaduan, Ruang Pengaduan Publik, Pengaduan Melalui Media Elektronik (Email : ppsppsbitung@yahoo, Facebook : @Humas_PPS Bitung, Twitter : @Humas_PPS Bitung, Instagram : @Humas_PPS Bitung,), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) terlampir. Berikut table pengaduan dan dokumen pengaduan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Bulan Februari 2023.

No	Bulan	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Keterangan
1	November	-	-	-

IV. PENUTUP DAN SARAN

Jumlah pengaduan (Pengaduan terkait administrasi pelayanan public dan pelayanan jasa kepelabuhanan) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Bulan November 2023 adalah Nihil dan tidak terdapat Pengaduan Baik berupa pengaduan dalam bentuk tulisan /saran yang disampaikan pada kotak pengaduan, langsung pada personil penerima pengaduan, Ruang Pengaduan Publik, Pengaduan Melalui Media Elektronik (Email : ppsppsbitung@yahoo, Facebook : @Humas_PPS Bitung, Twitter :@Humas_PPS Bitung,), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

Bitung, 30 November 2023

Sub Pokja
Pelayanan Usaha

Sub Pokja
Kesyahbandaran

Kodrat Twin Riskiyanti, SH., MH

Ari Prasetyo, S.T

Lampiran:



Lokasi Kotak Pengaduan : Kantor Utama PPS Bitung



Pengaduan Melalui Media Elektronik: Facebook Humas_PPS Bitung

 **Humas PPS Bitung**
@Humas_PpsBitung

Komik "siBitung" Edisi ke XV Terbit lagi nih #SahabatBahari Tentang Penanganan Pengaduan lingkup Unit Pelaksana Teknis PPS Bitung dan data penanganan pengaduan.
#DJPTBersinergi #PPSBitungTerbaik



Pengaduan Melalui Media Elektronik : Twitter Humas_PPS Bitung



Pengaduan Melalui Informasi Banner Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

LAPORAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

BULAN DESEMBER 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDEARA BITUNG
2023

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi. Yang paling utama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur tuntutan aspirasi reformasi, agar aparaturnya Negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan kewenangan kepada rakyat Indonesia sebagai pemenang kekuasaan tertinggi Negara.

Sebagai penjabaran lebih lanjut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, yang antara lain menjelaskan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan pelaporan masyarakat adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Keputusan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor KEP1/18/M/PAN/8/2004, tanggal 31 Agustus 2004, tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

II. PERSONIL TIM TINDAK LANJUT DAN PENANGANAN PENGADUAN

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Christian Evendy Yani Muaja, S.IK Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Ketua
2	Dola Mirantika Petma, A.Md Pranata Humas Pelaksana	Sekretaris
3	Marzel Hence Fityly Tumundo, A.Md AP3T Terampil	Anggota
4	Resti Priscilia Okem AP3T Pemula	Anggota
5	Ericer S. Titiheru, S.E Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan UPT

III. JUMLAH PENGADUAN DAN DOKUMEN PENGADUAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Dari hasil penanganan kegiatan pengaduan masyarakat selama bulan FEBUARI 2023 NIHIL dan tidak adanya pengaduan dalam bidang pelayanan masyarakat, sehingga pelayanan dikategorikan "BAIK" dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengaduan Masyarakat disampaikan dengan cara Kotak Pengaduan, Pengaduan Langsung, langsung pada personil penerima pengaduan, Ruang Pengaduan Publik, Pengaduan Melalui Media Elektronik (Email : ppsppsbitung@yahoo, Facebook : @Humas_PPS Bitung, Twitter : @Humas_PPS Bitung, Instagram : @Humas_PPS Bitung,), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) terlampir. Berikut table pengaduan dan dokumen pengaduan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Bulan Februari 2023.

No	Bulan	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Keterangan
1	Desember	-	-	-

IV. PENUTUP DAN SARAN

Jumlah pengaduan (Pengaduan terkait administrasi pelayanan public dan pelayanan jasa kepelabuhanan) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Bulan Desember 2023 adalah Nihil dan tidak terdapat Pengaduan Baik berupa pengaduan dalam bentuk tulisan /saran yang disampaikan pada kotak pengaduan, langsung pada personil penerima pengaduan, Ruang Pengaduan Publik, Pengaduan Melalui Media Elektronik (Email : ppsppsbitung@yahoo, Facebook : @Humas_PPS Bitung, Twitter :@Humas_PPS Bitung,), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

Bitung, 29 Desember 2023

Sub Pokja
Pelayanan Usaha

Sub Pokja
Kesyahbandaran

Kodrat Twin Riskiyanti, SH., MH

Ari Prasetyo, S.T

Lampiran:



Lokasi Kotak Pengaduan : Kantor Utama PPS Bitung



Pengaduan Melalui Media Elektronik: Facebook Humas_PPS Bitung

 **Humas PPS Bitung**
@Humas_PpsBitung

Komik "siBitung" Edisi ke XV Terbit lagi nih #SahabatBahari Tentang Penanganan Pengaduan lingkup Unit Pelaksana Teknis PPS Bitung dan data penanganan pengaduan.
#DJPTBersinergi #PPSBitungTerbaik



Pengaduan Melalui Media Elektronik : Twitter Humas_PPS Bitung



Pengaduan Melalui Informasi Banner Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)